



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

**SISTEM LAPORAN ASET TETAP DALAM MENUNJANG
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
(Studi Kasus Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara)**

Muhammad Kholid Adfi¹, Saparuddin Siregar²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

Muhammadkholidadfi@gmail.com¹, saparuddin.siregar@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

The State Property Accounting Management Information System is an application that facilitates access and reporting to every government agency regarding the management of state property. The purpose of this study is to understand the application of management accounting in the state-owned asset information system, the implementation and management of state-owned assets, and to understand the management responsibilities of the National Research Center. The methodology used in this research is descriptive qualitative research which aims to present facts, situations and phenomena that occur during the research process, while data collection techniques are carried out through interviews with sources and library research. The results show that the implementation of the National Property Accounting Management Information System is very important in the management of the BMN Geotechnical Research Center, although in terms of managing the State-Owned Geotechnical Research Center, it is considered qualitatively not going well, especially in the case of the inventory of state property.

Keywords: *Management Accounting System, Accountability, State Wealth*

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara merupakan aplikasi yang memudahkan akses dan pelaporan kepada setiap instansi pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan akuntansi manajemen dalam sistem informasi aset milik negara, implementasi dan pengelolaan aset milik negara, dan untuk memahami tanggung jawab pengelolaan Pusat Riset Nasional. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan fakta, situasi dan fenomena yang terjadi selama proses penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Properti Nasional sangat penting dalam pengelolaan Pusat Penelitian Geoteknik BMN, meskipun dalam hal pengelolaan Pusat Penelitian Geoteknik Milik Negara dinilai secara kualitatif belum berjalan dengan baik terutama pada kasus inventarisasi barang milik negara.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Manajemen, Pertanggung Jawaban, Kekayaan Negara

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah kegiatan yang bertujuan. Tujuan akuntansi dirancang untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan untuk tujuan yang berbeda di sektor swasta dan publik. Instansi pemerintah mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, instansi pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang bernilai finansial, termasuk investasi aset, ketika menjalankan bisnis.

Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kami menyebut prinsip akuntansi ini SAP dan ini adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi yang mencakup pengumpulan, pencatatan, penggabungan dan pelaporan data tentang kondisi keuangan dan operasi pemerintah. Ada pernyataan dalam SAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset. Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinyatakan dalam mata uang, dan uang atau barang yang dapat dijadikan barang milik negara dalam sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Segala sesuatu yang berbentuk Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dijelaskan pula dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah, didalam peraturan pemerintah (PP) No.6 Tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Akuntansi: Menurut Syahman Sitompul Jenis pertama berdasarkan proses pencatatan, menggolongkan dan megikhtisarkan keuangan-keuangan yang terjadi diperusahaan atau lembaga serta melaporkan hasilnya dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan keuangan. Jenis yang kedua berdasarkan dengan fungsinya, suatu kejadian biasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif terutama informasi keuangan yang terjadi di dalam kuantitas atau lembaga ataupun perusahaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif.

Menurut Suwardjono, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan serta menafsirkan hasil prosesnya secara efisien dan dalam satuan moneter. Sedangkan menurut Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel Akuntansi (Accounting) adalah suatu unit sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi kepada pemakai

yang berkepentingan. Dasar akuntansi Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, akuntansi dijelaskan sebagai terjemahan dari Surah Al-Baqarah 282. Akuntan dalam Surat Al-Baqarah 282 berisi perintah, larangan dan anjuran, di antaranya adalah nasehat tentang apa yang harus dilakukan. Dilaksanakan untuk tujuan pencatatan transaksi, dalam Al-Qur'an anjuran pencatatan terdapat dalam Surat Al-Baqarah 282, mengetahui pencatatan transaksi.nasehatnya, yang penting kita memahami catatan Islam tentang peraturan-peraturan tentang ketentuan dan persyaratan dalam Al-Qur'an. Dalam sejarah pencatatan tradisional (akuntansi), Lucas Pacioli dikenal sebagai penemu akuntansi modern, namun sebelum Pacioli dikenal sebagai penemu akuntansi, tahun 622 M telah membuktikan bahwa beberapa sistem pencatatan transaksi dikembangkan di Madinah, dan selanjutnya berkembang selama pemerintahan Abbasiyah pada 750 M. Termasuk Al Jaridah Annafakat (Jurnal pengeluaran atau expenditure Journal), Jaridah al-mal (jurnal penerimaan dana untuk Baitul Mall) dan lain-lain.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan: *Financial Accounting Standards Board (FASB)* merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi untuk menentukan standar akuntansi keuangan sejak tahun 1973 di Amerika.

Menurut mereka, konsep akuntansi itu sendiri adalah “suatu kegiatan jasa untuk menyediakan informasi atau data kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi” (2017). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan yang membantu untuk menghasilkan laporan keuangan, yang dapat dianalisis untuk mengambil keputusan yang benar. Pengertian sistem akuntansi pemerintah menurut PP No. 24 Tahun 2005: Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual atau komputerisasi yang dimulai dengan pengumpulan, pencatatan, penggabungan, dan pelaporan data tentang posisi keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem Akuntansi: Menurut Mulyadi Sistem Akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan selengkap mungkin untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen agar memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi memiliki 5 unsur pokok sebagai penunjang kegiatan operasional suatu organisasi. Yang pertama ada formulir yaitu sebuah dokumen pencatatan atas transaksi-transaksi dan data keuangan; unsur yang kedua jurnal untuk mencatat dan mengklasifikasikan sesuai jenisnya; kemudian diposting kedalam buku besar; kemudian juga mencatat buku besar pembantu yang mengklasifikasikannya tidak ada dalam buku besar; sebagai tahapan terakhir yaitu pembuatan laporan keuangan.

Tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat (daerah):

1. Melindungi aset pemerintah dan lembaganya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kegiatan anggaran dan keuangan pemerintah pusat (daerah), termasuk pusat (daerah) dan instansi, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja, menentukan kepatuhan terhadap mandat anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan lembaga dan pemerintah pusat (daerah) secara keseluruhan.
4. Informasi keuangan yang memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan manajemen dan pengendalian yang efektif atas kegiatan dan keuangan pemerintah.

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dalam SAPP: Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah seperangkat prosedur manual dan terkomputerisasi dari pengumpulan, pencatatan, dan penggabungan data, dan pelaporan posisi keuangan dan efektif pemerintah inti. SAPP memiliki dua subsistem, Sistem Akuntansi Perbendaharaan Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Negara (Chief Financial Officer [CFO]) dan Sistem Akuntansi Kelembagaan (SAI) yang dilaksanakan oleh

Menteri/Kepala Badan Teknis selaku eksekutif Chief Operations Officer (COO). Sistem informasi akuntansi aset milik negara dan sistem akuntansi keuangan harus berjalan secara bersamaan sebagai subsistem. Dengan cara ini dapat dilakukan check and balances antara arus modal dan arus barang. Selain itu, sistem informasi manajemen akuntansi aset milik negara merupakan sistem yang komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan dan akuntabilitas secara bersamaan prosedural manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca. Disamping itu Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara juga menghasilkan data barang, laporan barang dan berbagai kartu kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan Barang Milik Negara.

Berikut ini konsep-konsep dasar dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara:

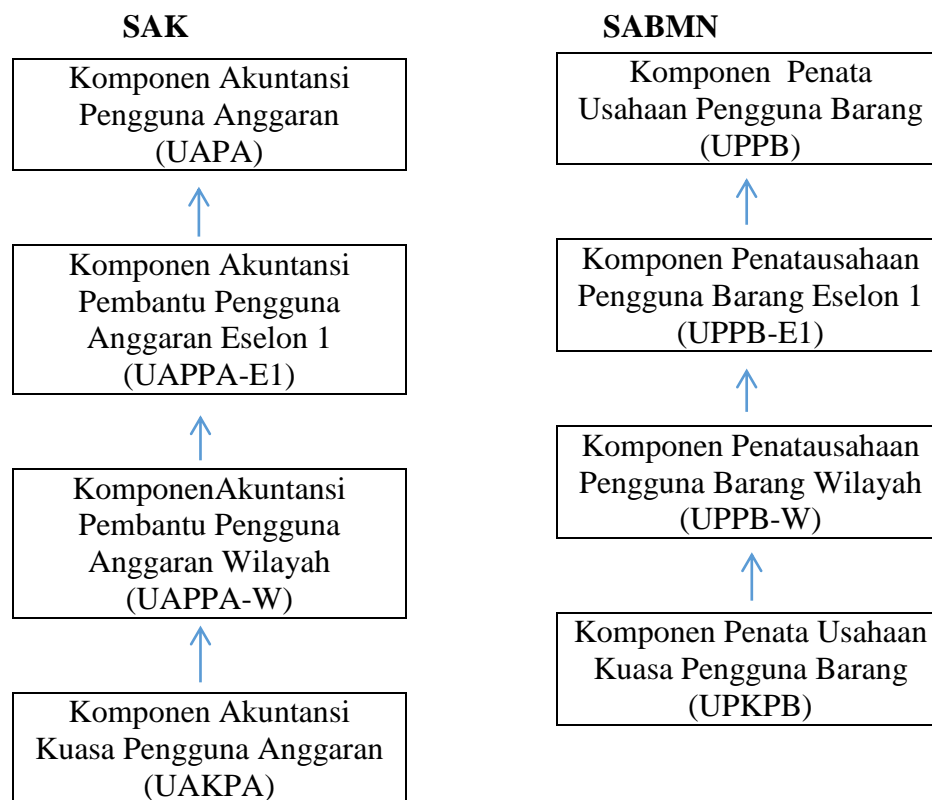
1. Klasifikasi BMN mudah untuk diidentifikasi, dan setiap BMN diklasifikasikan menurut metode tertentu, yang nyaman untuk manajemen.
2. Kode BMN mudah untuk direkam dan dikontrol, selain diidentifikasi dalam bentuk nama, BMN juga dalam bentuk kode.
3. Tabel kode barang untuk setiap BMN dicatat dengan mengacu pada kode BMN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Badan Usaha Milik Negara.
4. Kategori kondisi BMN: Barang baik, rusak ringan dan berat.
5. Daftar Komoditas Daftar Komoditas adalah daftar yang digunakan untuk mencatat mutasi BMN secara terus menerus, dimulai dari BMN tempat asalnya sampai dicabut.

Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara: Definisi para ahli tentang manajemen bervariasi karena para ahli melihat apa artinya dari perspektif yang berbeda. Ada yang mereview manajemen dari segi fungsi, objek, institusi, dll, dan ada yang mereview manajemen secara keseluruhan. Namun jika ditelaah secara prinsip, definisi-definisi tersebut mengandung arti dan tujuan yang sama. Berikut beberapa definisi manajemen menurut para ahli: Cushway & Lodge (Wardoyo, 1999:41) memberikan definisi: “Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang berpusat pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Singkatnya, manajemen mengacu pada serangkaian kegiatan yang berpusat pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pemantauan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Barang milik negara atau barang milik negara adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat karena peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, dan dapat diukur dalam satuan. Uang, termasuk sumber daya. Sumber daya nonfinansial yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya” (Halim, 2007: 111) Barang milik negara (BMN) adalah semua kekayaan yang diperoleh berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan lainnya yang sah. perolehan Barang yang dibeli atau diperoleh dengan imbalan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) Termasuk dalam pengertian barang yang berasal dari perolehan lain yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 (PP.6: Pasal 2), yang meliputi:

1. Barang yang diterima dari sumbangan dll.
2. Barang yang didapat untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian/kontrak
3. Barang yang didapat menurut hukum
4. Perolehan barang Item yang diputuskan untuk diperoleh kekuatan hukum tetapnya.

Gambar 1.1: Organisasi Sistem Akuntansi Instansi



Hasil pelaporan usaha BMN nantinya akan bisa dipakai untuk:

- Menyusun neraca pemerintah pusat setiap tahun.
- Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN direncanakan setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan perencanaan anggaran.
- Pengamanan pengelolaan BMN.

Akuntabilitas: Memahami bahwa menurut Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Geoteknik tahun 2010, akuntabilitas adalah: kekuasaan untuk menuntut informasi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Akuntabilitas Keuangan

Tanggung jawab keuangan adalah tentang integritas Penunjukan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk mengajukan laporan keuangan dan peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan dan pembayaran dana oleh instansi pemerintah.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat atau benefit pada dasarnya menitikberatkan pada hasil kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, semua pejabat pemerintah dianggap responsif terhadap pencapaian tujuan (dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat), daripada hanya mengikuti hierarki atau prosedur. Efek yang harus dicapai tidak hanya output, tetapi juga Yang lebih penting adalah validitas hasil. Akuntabilitas kesejahteraan hampir sama dengan Akuntabilitas program.

3. Akuntabilitas Prosedural

Tata cara identifikasi dan pelaksanaan kebijakan telah mempertimbangkan masalah etika, etika, kepastian hukum dan kepatuhan terhadap keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, sesungguhnya Akuntabilitas Publik harus mengarah pada pengukuran secara komprehensif kepada keluaran, hasil dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat serta pada akhirnya memperhitungkan dampak yang diperoleh pada hasil dari perencanaan tersebut.

Pengertian Aset Tetap: Entitas membutuhkan laporan keuangan untuk meringkas posisi keuangannya. Neraca adalah salah satu laporan keuangan dasar yang biasanya disiapkan oleh organisasi nirlaba untuk digunakan oleh investor, kreditur, dan pengambil keputusan eksternal lainnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aktiva (aset/aset) dan kewajiban (kewajiban dan modal). Aset termasuk aset lancar, aset tetap dan aset lain-lain. Aset tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca yang sangat penting bagi perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan sebagai penunjang tercapainya tujuan didirikan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ketelitian dan kecermatan dalam pengolahan aset tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan.

Jenis aset tetap: Suatu aset dapat memiliki masa manfaat yang melebihi suatu periode akuntansi dan memiliki masa manfaat yang relatif besar. nilai, tidak dijual kembali. Namun, jika aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan, aset tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dapat diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang atau aset lainnya. Pengelompokan aset tetap ditinjau dari beberapa perspektif, antara lain:

- a. Aset tetap berwujud: Merupakan aset tetap yang mempunyai bentuk fisik dan dapat dikenali melalui panca indera, aset tetap berwujud dilihat dari umurnya, dibagi dua yang pertama aset berwujud yang mempunyai umur tidak terbatas yang misalnya: tanah untuk dibangun jenis aktiva ini tidak perlu dilakukan depresiasi dan yang kedua aset tetap berwujud yang mempunyai umur terbatas, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu aset tetap berwujud yang dapat diperbaharui misal: gedung, kendaraan, mesin, peralatan. Dan yang kedua aset tetap berwujud yang tidak dapat diperbaharui, misalnya: konsesi tanah tambang. Aset tetap berwujud ditinjau dari mobilitasnya, dibagi menjadi dua: pertama Aset tetap berwujud bergerak dan aset tetap berwujud tidak bergerak.
- b. Aset tetap tidak berwujud: Merupakan aset jangka panjang yang tidak terlihat secara fisik. Misalnya: goodwill, franchise, trade mark, dan copy right.

Peraturan Kementerian Keuangan Mengenai Prosedur Penilaian Kembali Aset Tetap pada BMN di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara: Berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan nomor 2/PMK.06/2014 tentang penilaian internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penilaian DJKN dapat melakukan penilaian dalam rangka pengelolaan aset Barang Milik Negara bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penilaian aset tetap pada BMN, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian aset tetap pada BMN.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif, selain itu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi subyek penelitian dan pertanyaan yang diajukan dalam metode wawancara untuk memberikan peneliti data yang dapat digunakan dalam penelitian.

Wawancara: Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik dengan pewawancara tatap muka dengan informasi atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dilakukan agar jawaban yang diberikan lengkap dan tetap memberikan kebebasan kepada partisipan untuk menggunakan istilahnya sendiri tentang fenomena yang diteliti, bukan hanya menjawab pertanyaan.

Observasi: Sebagai upaya peneliti untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi.

Tempat dan Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dengan Waktu Penelitian Selama 1 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian: Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara di kantor pemerintahan wilayah DJKN Sumatera Utara. Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) untuk pengelolaan aset. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Contoh Kasus: 20 Mei 2021, Pemerintah Daerah membeli tanah beserta bangunannya dengan harga Rp100.000.000.- Ditaksir nilai tanah sebesar Rp40.000.000.- dan nilai bangunan sebesar Rp60.000.000.-

Tabel 1.1: Jumlah saat Bendahara Pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut.

| Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| 20 Mei 2021 | Tanah | 40.000.000 | |
| | Gedung | 60.000.000 | |
| | Kas Bendahara Pengeluaran | | 100.000.000 |

Pertukaran Aset Tetap: Aset tetap merupakan salah satu yang bisa didapatkan dengan cara pertukaran atau menukarkannya dengan sebagian aset tetap yang tidak sama atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Salah satu aset tetap dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan seperti ini tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru didapat dan dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.

Contoh Kasus: Awal tahun 2021 Pemda melakukan tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang ditukar adalah Rp10.000.000.- sedangkan nilai pasar tanah yang didapat adalah Rp15.000.000.- Kekurangan sebesar Rp5.000.000.- dibayar tunai yang telah dianggarkan dalam belanja modal.

Tabel 1.2: Jurnal saat Bendahara Pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut.

| Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|-------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 20 Mei 2021 | Tanah (baru) | 15.000.000.000 | |
| | Tanah (lama) | | 10.000.00.000 |
| | Kas Bendahara Pengeluaran | | 5.000.000.000 |

Aset Donasi: Termasuk sumbangan aset untuk pemerintah tanpa ada syarat. Pendapatan aset tetap dari donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang diakui sebagai pendapatan operasional. Aset tetap yang didapat dari donasi (sumbangan) harus dicatat sesuai dengan nilai pendapatan.

Contoh Kasus: Pada tanggal 1 Mei 2021 Pemda memperoleh donasi dari Bank Dunia berupa 5 buah mobil kijang. Mobil kijang dengan tipe dan kriteria yang sama tersebut mempunyai nilai wajar masing-masing sebesar Rp120.000.000.- Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada SKP.

Tabel 1.3: Jurnal Aset Donasi yang harus dibuat di akuntansi SKPKD adalah.

| Tanggal | Uraian | Debet | Kredit |
|------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1 Mei 2021 | Kendaraan roda 4 Ekuitas | 120.000.000 | 120.000.000 |

KESIMPULAN

Perlakuan Laporan Akuntansi Aset Tetap yang ada di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, dimana aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh kantor yang tidak diperjual belikan kembali dan dapat dipakai, juga memberikan manfaat jangka waktu lebih dari satu tahun. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara melaksanakan perubahan didalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara yang kegiatan operasionalnya menggunakan aset tetap melalui pembelian dan dropping.

DAFTAR LITERATUR

- Anggriawan, F. (2009). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Terhadap Pengendalian Intern Aktiva Tetap pada Departemen Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Selatan . *Repository. UNSRI*.
- Arifin, M. H. (2011). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. *repository UIN SUSKA*.
- Christian, F. (2019). Analisis Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maerauke. *jurnal unsrat*, vol 7 No.1.
- Dady Nurpadi, M. H. (2021). Pengaruh Penata Usahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BNM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pertahanan Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Humantech*, 178-186.
- Monika Sutri Kolinung, V. I. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *ejournal. unsrat*, vol 3 no.1.
- Muamar Alba, J. M. (2018). Analisis Perlakuan dan Pelaporan Akuntansi Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 120-132.
- Naibaho, V. A. (2016). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara Terhadap Kantor Pertahanan Kab.Labuhan Batu. *repository.UHN*.
- Nugroho, L. (2017). Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Barang Milik Negara. *Sistem Informasi, Keuangan , Audit dan Perpajakan (SIKAP)*, 20-34.
- Sayekti, F. N. (2017). Penerapan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . *Jurnal EKUBIS*.
- Sofiana, R. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. *Repository. UHN*.

Veronika Mulalinda, S. J. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem dan Peosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal. Unsrat*, Vol 2 No. 1.